

KETERLIBATAN UNIT KERJA DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DALAM MEMPERLANCAR SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Usna Nurindrias Tutik, Muhammad Amin, Adcha Maziyah, Nova Syafira Ariyanti

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5 Malang
Email: usna.nurindrias@um.ac.id

Abstract: This research aims to describe the division of tasks, describe the form of engagement, describe supporting factors and describe the factors inhibiting the involvement of work units in FIP UM in the smooth completion of financial accountability letters. This research was conducted with a qualitative approach using a case study design conducted at the Faculty of Education (FIP) of Malang State University (UM). Data collection is done by utilizing google form. Checking the validity of data uses credibility. The results of the research are, (1) the division of tasks is carried out from the beginning of the preparation of the activity plan to the completion of the SPJ, (2) the form of involvement from several parties such as superiors in each unit such as the head of the department and other employees, (3) supporting factors, namely the deadline given sufficient, regulations regarding drafting and requirements do not change much from each year, communication with the FIP financial unit also ensures, and the settlement of financial SPJ is provided assistance, and (4) inhibition factors, namely, lack of socialization related to supporting data needed in reporting activities, lack of open information related to SPJ changes, when examining SPJ support data not in general but only in the details of supporting data one by one, SPJ has been around for a long time.

Keywords: Work unit; Accountability report; Finance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian tugas, mendeskripsikan bentuk keterlibatan, mendeskripsikan faktor pendukung dan mendeskripsikan faktor penghambat keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam kelancaran penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan rancangan studi kasus yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM). Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan *google form*. Pengecekan keabsahan data menggunakan kredibilitas. Hasil dari penelitian yakni, (1) pembagian tugas dilakukan mulai awal penyusunan rencana kegiatan hingga penyelesaian SPJ, (2) bentuk keterlibatan dari beberapa pihak seperti atasan yang ada pada masing-masing unit seperti ketua jurusan dan pegawai lain, (3) faktor pendukung yakni tenggat waktu yang diberikan mencukupi, peraturan mengenai penyusunan dan persyaratan tidak berubah banyak dari setiap tahunnya, komunikasi dengan pihak unit keuangan FIP juga memadahi, dan penyelesaian SPJ keuangan diberikan pendampingan, dan (4) faktor penghambat yakni, kurangnya sosialisasi terkait data dukung yang diperlukan dalam melaporkan kegiatan, kurang terbukanya informasi terkait perubahan SPJ, saat memeriksa data dukung SPJ tidak secara umum melainkan hanya pada detail data dukung satu persatu, hal ini membuat penyelesaian SPJ menjadi lama.

Kata Kunci: Unit Kerja; Surat Pertanggungjawaban; Keuangan

organisasi memiliki tujuan untuk mencapai kesuksesannya tentunya di dalam organisasi profit maupun non-profit. Kesuksesan tersebut akan dicapai secara berkala dan dalam semua bidang yang ada organisasi. Untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak terlepas dari kinerja yang ada di dalam organisasi. Kinerja dari setiap pegawai yang ada di dalamnya, tidak hanya kinerja pegawai melainkan pada unit pelaksana yang ada. Unit pelaksana atau sering disebut sebagai unit kerja merupakan suatu wadah untuk menggerakkan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi (Buades, dkk:2020; Knight:2009; Sheehan, dkk:2020). Maknanya, unit kerja di dalam sebuah organisasi merupakan bagian untuk menggerakkan pegawai dalam mencapai tujuan kesuksesan sebuah organisasi.

Unit kerja juga memiliki beberapa tanggungjawab untuk mencapai tujuan dari organisasi (Ariyanti, dkk: 2021). Bentuk tanggungjawab tersebut bisa merupakan capaian kinerja pegawai, keuangan, promosi organisasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu yang dapat dicapai oleh suatu unit yakni bidang keuangan, bidang keuangan sendiri merupakan hal yang sensitif, sehingga perlu ketelitian dalam mengelolanya. Setiap transaksi yang dilakukan perlu adanya pembukuan. Pembukuan tersebut dilakukan oleh satu pihak agar tercatat dengan rapi dan baik. Hal-hal yang perlu ada dalam pengelolaan keuangan yakni seperti pengukuran jumlah atau nominal dan kepastian aliran keuangan dipergunakan. Hal ini merupakan bagian dari manajemen keuangan organisasi, manajemen keuangan merupakan salah satu bidang yang berfungsi dalam penagmbilan keputusan jangka panjang serta pengelolaan modal organisasi (Arifin:2017; Cahyaningdyah & Ressay:2013).

Mengelola keuangan memerlukan sinergi di setiap unit yang ada dalam organisasi. Hal ini mengharuskan unit kerja lain juga mempelajari bagaimana mengelola keuangan. Mengelola keuangan terdapat beberapa langkah menurut Hayati (2020); Reyhannisa & Fatmawati (2020) yakni, perencanaan keuangan, pemilahan kegunaan uang, penggunaan uang untuk pembelian maupun pembayaran, pelaporan penggunaan keuangan. Berdasarkan beberapa langkah tersebut setiap unit kerja dituntut mampu memberikan pelaporan penggunaan keuangan atau sering disebut dengan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) merupakan bagian dari Universitas Negeri Malang (UM), organisasi besar seperti UM tentunya memiliki tujuan untuk mencapai kesuksesan, terbukti dengan salah satu tujuannya yakni menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan (Malang, 2019; Ubaidillah, dkk: 2020). Maknanya, UM menjadi suatu organisasi dengan beberapa capaian yang harus diraihinya, dengan begitu untuk memudahkan dalam menjadi organisasi yang akuntabel dan transparan perlu adanya kemudahan dalam menyusun SPJ keuangan. Hal ini dilihat dari kinerja FIP UM dalam menggerakkan tanggungjawab dari unit kerja yang ada, yakni melalui unit kerja kepegawaian dan keuangan membantu kemudahan dalam menyusun SPJ keuangan dengan melibatkan unit kerja lain seperti unit akademik, kemahasiswaan dan alumni, unit umum dan barang milik negara, sampai kepada unit di tingkat jurusan maupun program studi. Pelibatan beberapa unit kerja yang ada di FIP UM akan memudahkan dalam melaporkan penggunaan keuangan.

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, tujuan penelitian seperti berikut, 1) Mendeskripsikan pembagian tugas keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam memperlancar penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan; 2) Mendeskripsikan bentuk keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam memperlancar penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan; 3) Mendeskripsikan faktor pendukung keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam kelancaran penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan; dan 4) Mendeskripsikan faktor penghambat keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam kelancaran penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak seperti pada pegawai yang berada di UM khususnya lingkup FIP. Selain itu manfaat yang dapat dirasakan yakni secara teoritik dan praktis. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mempelajari kemudahan dalam menyusun surat pertanggungjawaban. Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai model memberikan pelatihan menyusun surat pertanggungjawaban dengan mudah, cepat dan tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, hal ini dilakukan karena kasus terdapat pada satu latar belakang penelitian yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dengan memanfaatkan *google form*. Pemanfaatan *google form* guna menggali data tentang keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam memperlancar surat pertanggungjawaban keuangan, di samping itu karena masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Kemudian didukung dengan pengamatan secara partisipatif di lokasi penelitian serta melakukan telaah studi dokumentasi terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi kepada seseorang informan kunci dan informan pendukung. Dua teknik lainnya yang digunakan di dalam mengecek kredibilitas data penelitian ini adalah pengecekan anggota secara acak (*random member check*) dan diskusi teman sesama peneliti.

Pelaksanaan auditabilitas data penelitian yakni dengan pengumpulan dan penganalisisan data pada situs selesai dilakukan, maka dilakukan pengecekan konsistensi antara rumusan kesimpulan, temuan-temuan sementara, paparan data, dan catatan lapangan. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi: (1) penyusunan seluruh catatan lapangan berdasarkan kronologis waktu pengumpulan data; (2) reduksi data dengan menggunakan teknik potong dan tempel; (3) pemaparan dan analisis domain data; dan (4) penarikan kesimpulan.

HASIL

Pembagian Tugas Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Memperlancar Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dalam sebuah organisasi tentunya memiliki banyak yang harus terpenuhi. Hal ini dikarenakan yang dilaporkan merupakan keuangan, atau hal yang sensitif bagi berbagai kalangan. Khususnya pada unit di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (FIP UM), untuk penyelesaian SPJ keuangan secara detail penggunaan anggaran harus dilaporkan. Untuk menyelesaikan SPJ keuangan ini peran masing-masing tenaga kependidikan yakni mengumpulkan data dukung untuk penyelesaian SPJ keuangan, kemudian mengerjakan serta menyelesaikannya. Sebelum menyelesaikan SPJ keuangan terdapat hal yang perlu dipersiapkan yakni kelengkapan serta rambu-rambu SPJ seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Uang Muka Kegiatan (UMK).

SPJ keuangan ini tentunya diberikan oleh atasan kepada pihak yang berhak dan bertanggungjawab mengerjakannya. SPJ keuangan ini pihak yang menyelesaikan diberikan tanggungjawab oleh ketua jurusan masing-masing, di samping itu untuk proses penyelesaian terdapat beberapa pihak yang ikut serta terlibat seperti pejabat jurusan (ketua jurusan, sekretaris jurusan dan kepala laboratorium jurusan), panitia kegiatan serta tenaga kependidikan di bawah unit yang ada. Sebelum SPJ keuangan ini diserahkan kepada unit yang bertanggungjawab memeriksa, terlebih dahulu terdapat pemeriksaan dari atasan di masing-masing unit.

Bentuk Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Memperlancar Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

Menyelesaikan SPJ keuangan tentunya harus ada keterlibatan dari beberapa pihak. rekan kerja sesama tenaga kependidikan yang ada pada unit turut serta membantu dalam penyelesaian, begitu pula dengan dukungan dari ketua jurusan untuk segera menyelesaikannya. Walaupun dalam pengerjaannya, SPJ keuangan ini dikerjakan secara individual oleh pihak tenaga kependidikan yang ada pada unit. Pengerjaan SPJ keuangan sendiri dikerjakan secara akuntabel, maknanya dalam pengerjaan atau penyelesaiannya SPJ keuangan ini dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hal yang dapat dipertanggungjawabkan ini pun didukung oleh bahan yang dipersiapkan sebelum mengerjakan SPJ keuangan. Tentunya, dalam hal ini SPJ keuangan juga secara transparan dikerjakan dan disampaikan kepada pihak keuangan FIP UM

dan ketua jurusan. hal ini dilakukan agar tidak terdapat kecurangan dalam pelaporannya. Sama halnya dengan pengerjaan yang dilakukan secara akuntabel, transparansi ini dilakukan persiapan matang sebelum mengerjakannya.

Faktor Pendukung Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Kelancaran Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

Kelancaran dalam penyelesaian SPJ keuangan dalam organisasi tentunya memiliki faktor pendukung. Faktor pendukung inilah yang membuat SPJ keuangan cepat terselesaikan. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yakni, (1) Tenggat waktu yang diberikan oleh unit keuangan FIP sudah mencukupi untuk menyelesaikan SPJ keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan; (2) Peraturan mengenai penyusunan dan persyaratan dalam menyelesaikan SPJ keuangan pun tidak berubah banyak dari setiap tahunnya, sehingga hal ini mempermudah pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan SPJ keuangan tidak banyak beradaptasi; (3) Komunikasi dengan pihak unit keuangan FIP juga memadai, sehingga ketika terdapat kendala dapat teratasi dan secara cepat dapat dikomunikasikan; dan (4) Penyelesaian SPJ keuangan pun tentunya terdapat kesalahan atau kekurangan, tetapi dalam hal ini pihak keuangan FIP selalu memberikan pendampingan dengan kemudahan komunikasi sehingga revisi tidak banyak.

Faktor Penghambat Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Kelancaran Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

Selain terdapat faktor pendukung dalam penyelesaian SPJ keuangan, terdapat pula faktor penghambat. Dalam hal ini, penghambat bukan dari prosesnya melainkan dari sisi peraturan, artinya harus menyesuaikan pengerjaan SPJ mulai dari awal pengerjaan. Hal lain juga menjelaskan bahwa penghambat dari kelancaran penyelesaian SPJ yakni kurangnya sosialisasi terkait data dukung yang diperlukan dalam melaporkan kegiatan, kurang terbukanya informasi terkait perubahan SPJ, saat memeriksa data dukung SPJ tidak secara umum melainkan hanya pada detail data dukung satu persatu, hal ini membuat penyelesaian SPJ menjadi lama. Beberapa hal tersebut menjadi penghambat dalam menyelesaikan SPJ secara tepat waktu.

PEMBAHASAN

Pembagian Tugas Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Memperlancar Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

Menyelesaikan SPJ keuangan dalam setiap unit tentunya memiliki peran masing-masing. Peran tersebut yakni mengumpulkan data dukung untuk penyelesaian SPJ keuangan, kemudian mengerjakan serta menyelesaikannya. Sama halnya dengan pendapat Erlinawati & Badrus (2018); Lenap, dkk (2020); Mulyanti (2017) menjelaskan bahwa terdapat tiga aktivitas utama dalam mengelola keuangan yakni *allocation of funds*, *raising of funds*, dan *management assests*. Maknanya dalam mengelola keuangan harus terdapat *management assests* atau aktivitas pengelolaan kegiatan, hal ini mengharuskan terdapat seseorang dalam mengelola kegiatan, ketika mengelola kegiatan pun harus disertai dengan pengelolaan keuangan. Dengan begitu dalam mengelola kegiatan dan keuangan secara bersamaan akan memudahkan dalam menyelesaikan SPJ.

Sebelum menyelesaikan SPJ keuangan terdapat hal yang perlu dipersiapkan yakni kelengkapan serta rambu-rambu SPJ seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Uang Muka Kegiatan (UMK). Beberapa data dukung yang harus ada dalam SPJ ini merupakan kunci dalam menyelesaikan SPJ. Sama halnya dengan pendapat Humaira & Sagoro (2018); Rosa & Listiadi (2020) dalam mengelola keuangan diperlukan adanya aktivitas yang berkaitan untuk mendapatkan biaya minimal dan syarat-syarat tertentu. Dengan begitu, dalam menyelesaikan SPJ ini terdapat beberapa data dukung seperti RAB dan UMK sebagai acuan untuk menyusun biaya minimal dan mempermudah mengetagui syarat-syarat yang nantinya digunakan sebagai data dukung SPJ.

SPJ keuangan ini tentunya diberikan oleh atasan kepada pihak yang berhak dan bertanggungjawab mengerjakannya. SPJ keuangan ini pihak yang menyelesaikan diberikan tanggungjawab oleh ketua jurusan masing-masing, di samping itu untuk proses penyelesaian terdapat beberapa pihak yang ikut serta terlibat seperti pejabat jurusan (ketua jurusan, sekretaris jurusan dan kepala laboratorium jurusan), panitia kegiatan serta tenaga kependidikan di bawah unit yang ada. Sebelum SPJ keuangan ini diserahkan kepada unit yang bertanggungjawab memeriksa, terlebih dahulu terdapat pemeriksaan dari atasan di masing-masing unit. Hal ini sama dengan pendapat Kurniatun (2018); Siswati (2018) bahwa keterlibatan beberapa pihak yang ada di dalam unit akan mempermudah dalam menyelesaikan SPJ, karena tentunya dalam setiap unit telah memiliki pihak tertentu untuk menyelesaikan SPJ.

Bentuk Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Memperlancar Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

SPJ keuangan ini dikerjakan secara individual oleh pihak tenaga kependidikan yang ada pada unit. Pengerjaan SPJ keuangan sendiri dikerjakan secara akuntabel, maknanya dalam pengerjaan atau penyelesaiannya SPJ keuangan ini dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hal yang dapat dipertanggungjawabkan ini pun didukung oleh bahan yang dipersiapkan sebelum mengerjakan SPJ keuangan. Tentunya, dalam hal ini SPJ keuangan juga secara transparan dikerjakan dan disampaikan kepada pihak keuangan FIP UM dan ketua jurusan. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat kecurangan dalam pelaporannya. Dengan demikian sama halnya dengan pendapat Fikrie & Ariani (2019); Meianti, dkk (2018); Tjahyanti & Puspasari (2017) bolos sekolah, kebosanan, kejenuhan hingga putus sekolah adalah beberapa hal yang dialami oleh siswa di Indonesia dan menjadi suatu permasalahan bagi para pendidik. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara mengembangkan keterlibatan siswa (*student engagement* menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus terlibat yakni *man, money, material, method*). Dengan begitu, *man* disini seperti pihak keuangan dan atasan (ketua jurusan), hal ini menjadikan SPJ transparan dan akuntabel.

Faktor Pendukung Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Kelancaran Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

Faktor pendukung inilah yang membuat SPJ keuangan cepat terselesaikan. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yakni, tenggat waktu yang diberikan oleh unit keuangan FIP sudah mencukupi untuk menyelesaikan SPJ keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sama halnya dengan pendapat Erlinawati & Badrus (2018) bahwa dalam mengelola keuangan terdapat tiga aktivitas, salah satunya yakni *management assets*. Maknanya dalam mengelola kegiatan juga perlu diperhatikan batas waktu dalam menyelesaikan SPJ. Peraturan mengenai penyusunan dan persyaratan dalam menyelesaikan SPJ keuangan pun tidak berubah banyak dari setiap tahunnya, sehingga hal ini mempermudah pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan SPJ keuangan tidak banyak beradaptasi.

Komunikasi dengan pihak unit keuangan FIP juga memadahi, sehingga ketika terdapat kendala dapat teratasi dan secara cepat dapat dikomunikasikan, sama halnya dengan pendapat Gustika (2020) menjelaskan bahwa dalam kegiatan menyelesaikan SPJ diperlukan adanya *forecasting* atau peramalan, salah satu unsur dalam *forecasting* yakni berinteraksi dengan pihak tertentu untuk menanamkan manajemen resiko sebagai kemudahan dalam mengelola keuangan, dengan begitu *forecasting* ini akan memudahkan pihak penyusun SPJ dalam menyelesaikannya karena juga banyak berinteraksi dengan pihak keuangan FIP. Penyelesaian SPJ keuangan pun tentunya terdapat kesalahan atau kekurangan, tetapi dalam hal ini pihak keuangan FIP selalu memberikan pendampingan dengan kemudahan komunikasi sehingga revisi tidak banyak.

Faktor Penghambat Keterlibatan Unit Kerja di FIP UM dalam Kelancaran Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Keuangan

Selain terdapat faktor pendukung dalam penyelesaian SPJ keuangan, terdapat pula faktor penghambat. Dalam hal ini, penghambat bukan dari prosesnya melainkan dari sisi peraturan, artinya harus menyesuaikan pengerjaan SPJ mulai dari awal pengerjaan. Pendapat Wati & Nugraheni (2020) where every expenditure must be equipped with complete and valid evidence that will be used for

the process of preparing Accountability Letter (SPJ menjelaskan bahwa terdapat beberapa penghambat dalam menyusun SPJ salah satunya pembagian kerja. Dengan demikian, hal ini sama yakni untuk menyusun SPJ agar cepat selesai yakni harus dengan membagi pada beberapa pihak, tetapi banyak pegawai yang lebih mementingkan tugas dan fungsinya dengan begitu ketika pengerjaan SPJ dibagi akan sulit dalam menyesuaikan.

Hal lain juga menjelaskan bahwa penghambat dari kelancaran penyelesaian SPJ yakni kurangnya sosialisasi terkait data dukung yang diperlukan dalam melaporkan kegiatan, ha; ini juga sama dengan pendapat Wati & Nugraheni (2020) where every expenditure must be equipped with complete and valid evidence that will be used for the process of preparing Accountability Letter (SPJ bahwa dokumen pelengkap SPJ berupa bukti-bukti transaksi berupa nota, kuitansi dan bukti lainnya. Jika data dukung ini tidak disampaikan secara detail pada sosialisasi maka akan menyulitkan penyusun SPJ. Kurang terbukanya informasi terkait perubahan SPJ, saat memeriksa data dukung SPJ tidak secara umum melainkan hanya pada detail data dukung satu persatu, hal ini membuat penyelesaian SPJ menjadi lama. Pendapat Qomariah (2021) juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan SPJ terdapat kendala kurangnya sumber daya manusia, hal ini menjadikan dalam pemeriksaan SPJ akan lama, sama halnya dengan penelitian ini dimungkinkan karena kurangnya sumber daya manusia sehingga dalam pemeriksaan cenderung detail satu persatu dan lama.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, menjelaskan bahwa pembagian tugas keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam memperlancar penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan yakni dengan peran masing-masing pegawai dengan mengumpulkan data dukung serta menyelesaikannya. Terlebih dahulu kelengkapan yang harus ada yakni Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Uang Muka Kegiatan (UMK). Bentuk keterlibatan unit kerja di FIP UM dalam memperlancar penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan yakni atasan dari masing-masing unit, karena FIP ini memiliki beberapa jurusan sehingga pihak yang terlibat yakni ketua jurusan dengan transparan dan akuntabel dalam penyampaian SPJ. Beberapa faktor pendukung keterlibatan dalam kelancaran penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan yakni (1) tenggat waktu yang diberikan oleh unit keuangan FIP sudah mencukupi untuk menyelesaikan SPJ keuangan; (2) Peraturan mengenai penyusunan dan persyaratan dalam menyelesaikan SPJ keuangan pun tidak berubah banyak dari setiap tahunnya; (3) Komunikasi dengan pihak unit keuangan FIP juga memadai; dan (4) Penyelesaian SPJ keuangan pun tentunya terdapat kesalahan atau kekurangan, tetapi dalam hal ini pihak keuangan FIP selalu memberikan pendampingan dengan kemudahan komunikasi sehingga revisi tidak banyak. Bertolak dari faktor pendukung tersebut, tentunya terdapat faktor penghambat yakni kurangnya sosialisasi terkait data dukung yang diperlukan dalam melaporkan kegiatan, kurang terbukanya informasi terkait perubahan SPJ, saat memeriksa data dukung SPJ tidak secara umum melainkan hanya pada detail data dukung satu persatu, hal ini membuat penyelesaian SPJ menjadi lama.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. (2017). Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. *FIKROTUNA*, 4(2). <https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2745>
- Ariyanti, N. S., Adha, M. A., Wiyono, B. B., Timan, A., Burhanuddin, & Mustiningsih. (2021). The Effect of Situational Leadership of the Head of Administration, Emotional Quotient and Achievement Motivation on Employee Performance at State University of Malang. *AIP Conference Proceedings* 2339, 020165, 020165. AIP Publishing LLC. <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0044894>
- Cahyaningdyah, D., & Ressany, Y. D. (2013). Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.15294/jdm.v3i1.2456>
- Erlinawati, T., & Badrus. (2018). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di Sman 1 Papar Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 8(3).

- Fikrie, & Ariani, L. (2019). Keterlibatan Siswa (Student Enagement) Di Sekolah Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Keberhasilan Siswa Di Sekolah. *Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Pendidikan 2019: Menjadi Siswa Yang Efektif Di Era Revolusi Industri 4.0*, 103–110.
- García-Buades, M. E., Peiró, J. M., Montañez-Juan, M. I., Kozusznik, M. W., & Ortiz-Bonnín, S. (2020). Happy-productive teams and work units: A systematic review of the ‘happy-productive worker thesis.’ *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010069>
- Gustika, R. (2020). Pengaruh Pendapatan dan Sikap Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan (Studi pada Ibu Rumah Tangga di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman). *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 8(3). <https://doi.org/10.31846/jae.v8i3.294>
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM dengan Menggunakan Metode Door to Door di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v3i2.1783>
- Humaira, I., & Sagoro, E. M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM Sentra Kerajina Batik Kapupaten Bantul. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19363>
- Knight, A. (2009). Re-engaging students disengaged with English: A unit of work on Othering. *English Teaching: Practice and Critique*, 8(1), 112–124.
- Kurniatun, K. (2018). Pembinaan Arsip Unit Kerja sebagai Upaya Penyelamatan Arsip. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/diplomatika.39562>
- Lenap, I. P., Nur Fitriyah, N. F., & Akhmad, Z. (2020). Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1). <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.88>
- Malang, U. N. (2019). Tujuan Universitas Negeri Malang. Retrieved April 14, 2021, from Malang website: <https://um.ac.id/tentang-um/visi-misi-tujuan/>
- Meianti, A., Rohman, H., & Mayretta, A. (2018). Perencanaan Implementasi Unit Kerja Rekam Medis Untuk Klinik Pratama Pancasila Baturetno Wonogiri. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.33560/.v6i2.198>
- Mulyanti, D. (2017). Manajemen Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 62–71.
- Permatasari, D. (2005). Fungsi Dan Tujuan Manajemen Pemasaran. *Jurnal Tadulako*, 6(2), 2217–2223.
- Qomariah, I. A. (2021). *Pengelolaan SPJ Pengeluaran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Reyhannisa, E. D., & Fatmawati, A. (2020). Sistem Infromasi Manajemen Keuangan di Pondok Pesantren Adh-Dhuha. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 1(2). <https://doi.org/10.20884/1.jutif.2020.1.2.20>
- Rosa, I., & Listiadi, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Pendidikan Keuangan di Keluarga, Teman Sebaya, dan Kontrol Diri terhadap Manajemen Keuangan Pribadi. *Jurnal Manajemen*, 12(2).
- Sheehan, M., Garavan, T. N., & Morley, M. J. (2020). Transformational leadership and work unit innovation: A dyadic two-wave investigation. *Journal of Business Research*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.072>
- Siswati. (2018). Manajemen Unit Kerja. *Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*.
- Tjahyanti, S., & Puspasari, P. A. (2017). Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keadilan Interaksional, Keadilan Temporal dan Keadilan Spasial Terhadap Kepuasan Kerja pada Unit Kerja Access dan Service Operation PT. XYZ. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i3.132>
- Ubaidillah, E., Gunawan, I., Adha, M. A., Ariyanti, N. S., & Erviana, Y. (2020). *Students Perception of Technology-Assisted Services and Readiness of Employee Digital Competencies in Covid-19 Pandemic Era*. 501(Icet), 151–156. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201204.026>
- Wati, S. M., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Faktor Penghambat Penyusunan SPJ Pengeluaran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 232–239. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.159>